

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan berdasarkan temuan data peneliti di lapangan hambatan keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Kerinci Tahun 2019 terdeskripsikan dengan cukup jelas. Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan sosio-ekonomi, hambatan politik dan kelembagaan dan hambatan pribadi dan psikologis memiliki peran yang cukup besar dalam menurunnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kerinci. Rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilu ini antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarki yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota.

Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkinya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen, kemudian dengan adanya penerapan mahar politik atau money politik di kabupaten kerinci yang masih amat kental sehingga

menjadi hambatan untuk perempuan bisa menyeimbangi laki-laki. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki dan juga disini walaupun partai politik sudah memenuhi kuota 30% dalam pencalonan tetapi mereka tidak mensupport atau tidak mengoptimalkan agar perempuan bisa duduk sebagai anggota legislatif. Ketiga, berhubungan dengan pribadi atau individu caleg itu sendiri, yang mana dengan adanya peran ganda mereka sebagai perempuan dan ibu rumah tangga yang menjadi hambatan untuk mereka terjun dalam dunia politik serta minimnya pemahaman mereka mengenai politik itu sendiri.

Berkaca pada teori hambatan oleh Farzana, bahwa sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisipan. selain itu, Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya

membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa hambatan sosio-ekonomi, hambatan politik dan kelembagaan dan hambatan pribadi dan psikologis merupakan indikator hambatan keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Kerinci Tahun 2019.

6.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena keterbatasan peneliti, untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar mendeskripsikan lebih detail lagi mengenai hambatan perempuan caleg pada pemilu secara lebih mendalam. Peneliti memberikan saran berdasarkan temuan hasil penelitian ini yaitu dengan meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik dengan cara mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai. Selain itu, dengan melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik. Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan politik dimana ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik menakutkan.



